



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Arlina Prabowo
Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Wibawa
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Wibawa

Jakarta, 27 Maret 2018

Pihak Pertama

Ika Arlina Prabowo

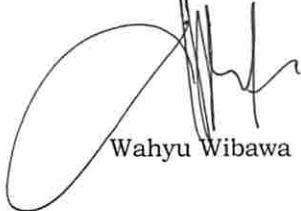


BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUB BAGIAN ANALISA DAN BANTUAN HUKUM
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum	1 Persentase pemberian nasehat hukum	70 %
	2 Persentase pemberian bantuan pendaftaran hak kekayaan intelektual	70 %
	3 Persentase pemberian pertimbangan hukum	70 %
	4 Persentase pemberian pendampingan hukum	70 %
	5 Persentase pemberian bantuan penyelesaian masalah di luar pengadilan (non litigasi)	70 %
	6 Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan di bidang SPK	8 kegiatan
2 Meningkatkan kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang SPK	7 Persentase analisis dan pengkajian ketentuan internasional di bidang SPK	90 %
3 Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	8 Persentase analisa hukum atas rancangan kerjasama BSN dengan subyek hukum nasional	90 %
	9 Persentase analisa hukum atas rancangan kerjasama BSN dengan subyek hukum internasional	90 %
4 Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang SPK	10 Jumlah kajian peraturan perundang-undangan di bidang SPK	3 dokumen
	11 Persentase analisis dan pengkajian penataan peraturan perundang-undangan di bidang SPK	100 %

Pihak Kedua



Wahyu Wibawa

Jakarta, 27 Maret 2018

Pihak Pertama



Ika Arlina Prabowo